

BAB IV

FRAMING KEBIJAKAN BARAK MILITER GUBERNUR JAWA BARAT DEDI MULYADI DALAM PEMBERITAAN KANTOR BERITA ANTARA

Bab ini menyajikan pembahasan hasil penelitian mengenai kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam bingkai pemberitaan Kantor Berita ANTARA. Pembahasan difokuskan pada bagaimana media mengonstruksi realitas kebijakan tersebut melalui berbagai sudut pandang, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi. Dengan menggunakan perspektif teori konstruksi sosial, bab ini berupaya memahami bahwa realitas kebijakan publik tidak hadir secara netral, melainkan dibentuk melalui proses seleksi isu, penekanan makna, serta interpretasi aktor sosial yang tampil dalam pemberitaan.

Analisis menunjukkan bahwa pemberitaan ANTARA merepresentasikan kebijakan barak militer sebagai fenomena yang memunculkan pro dan kontra di ruang publik. Di satu sisi, kebijakan tersebut dikonstruksikan sebagai upaya pembinaan disiplin, peningkatan karakter, serta solusi terhadap kenakalan remaja. Namun di sisi lain, muncul konstruksi kritis yang menyoroti aspek perlindungan anak, efektivitas pendekatan militeristik, serta perlunya kajian akademik dan regulasi yang matang. Perbedaan konstruksi ini memperlihatkan bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pendidikan yang bersifat kontroversial.

Selanjutnya, pembahasan dalam bab ini juga diarahkan pada refleksi teoritis dari temuan penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian menguatkan pandangan teori konstruksi sosial bahwa media massa tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi turut membentuk realitas sosial melalui proses framing dan representasi. Selain itu, temuan ini memperkaya kajian komunikasi dan media

terkait hubungan antara kebijakan publik, opini publik, serta dinamika legitimasi kebijakan melalui pemberitaan media.

Selain refleksi teoritis, bab ini juga menguraikan refleksi praktis dan sosial dari konstruksi media terhadap kebijakan barak militer. Implikasi praktis berkaitan dengan pertimbangan pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan karakter yang lebih komprehensif. Sementara itu, implikasi sosial mencakup pembentukan opini publik, potensi stigma terhadap anak bermasalah, serta dinamika hubungan antara institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan pada bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus refleksi kritis terhadap praktik kebijakan pendidikan dan peran media dalam membentuk realitas sosial.

4.1. Framing yang Muncul pada Berita Pro terhadap Kebijakan Pendidikan Barak Militer

Hasil analisis terhadap sejumlah berita yang mendukung atau cenderung memberikan legitimasi terhadap kebijakan pendidikan siswa di barak militer menunjukkan adanya pola framing yang relatif konsisten. ANTARA membangun konstruksi realitas bahwa program pendidikan di barak militer merupakan solusi terhadap persoalan kenakalan remaja dan krisis karakter generasi muda. Framing tersebut muncul melalui cara media mendefinisikan masalah, menjelaskan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi sebagaimana konsep framing menurut Entman (1993).

A. Pendidikan Barak Militer Membentuk Disiplin dan Karakter Siswa

Salah satu framing dominan yang muncul dalam kelompok berita pro adalah konstruksi bahwa pendidikan di barak militer diposisikan sebagai sarana pembentukan

karakter siswa. Dalam framing ini, media menempatkan persoalan utama yang dihadapi remaja bukan sekadar pelanggaran perilaku atau kenakalan sesaat, tetapi sebagai krisis karakter yang terjadi pada generasi muda. Masalah seperti tawuran, kurangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya tanggung jawab, serta lemahnya kedisiplinan direpresentasikan sebagai gejala dari degradasi moral yang membutuhkan intervensi khusus.

Dalam perspektif framing Entman (1993), media melakukan proses *problem definition* dengan mendefinisikan kenakalan remaja sebagai persoalan karakter. Kemudian pada tahap *causal interpretation*, penyebab masalah diarahkan pada lemahnya pembinaan kedisiplinan dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Selanjutnya media memberikan *moral evaluation* bahwa karakter disiplin merupakan nilai yang harus dimiliki oleh siswa, sedangkan perilaku menyimpang dipandang sebagai sesuatu yang harus diperbaiki. Pada tahap *treatment recommendation*, pendidikan di barak militer diposisikan sebagai solusi yang dinilai mampu membentuk karakter tersebut (Entman, 1993).

Hal tersebut terlihat dalam pemberitaan yang menekankan perubahan sikap siswa setelah mengikuti program pendidikan di barak militer. Salah satu kutipan yang digunakan ANTARA menyatakan:

"Anak saya berubah, lebih tenang, dan sopan" (ANTARA, 2025).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta mengenai pelaksanaan program, tetapi juga membangun narasi keberhasilan melalui pengalaman langsung dari orang tua siswa. Kehadiran testimoni semacam ini memiliki

peran penting dalam memperkuat legitimasi program karena perubahan perilaku diposisikan sebagai bukti konkret keberhasilan pendidikan barak militer.

Selain itu, karakter yang dibangun dalam framing ini tidak terbatas pada aspek disiplin semata. Pendidikan barak juga dikaitkan dengan nilai tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, rasa hormat, kerja sama, serta pengendalian diri. Dengan demikian, pendekatan militer dipersepsikan sebagai mekanisme pembiasaan perilaku positif yang dapat membentuk kepribadian siswa secara lebih terstruktur.

Melalui framing ini, pendidikan militer tidak dikonstruksikan sebagai bentuk hukuman atau tindakan represif terhadap siswa bermasalah. Sebaliknya, program tersebut dipahami sebagai proses pembinaan yang memiliki tujuan edukatif. Konsekuensinya, pembaca diarahkan untuk melihat metode pendidikan berbasis kedisiplinan sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan dalam menghadapi tantangan perilaku generasi muda saat ini.

B. Pendidikan Barak Militer Merehabilitasi Moral

Framing berikutnya yang muncul dalam kelompok berita pro adalah pendidikan barak militer sebagai upaya rehabilitasi moral siswa. Berbeda dengan framing sebelumnya yang lebih menekankan pembentukan karakter jangka panjang, framing ini memosisikan pendidikan militer sebagai sarana memperbaiki perilaku dan moral siswa yang telah dianggap mengalami penyimpangan.

Dalam berbagai pemberitaan, siswa yang mengikuti program pendidikan di barak digambarkan sebagai individu yang membutuhkan pembinaan khusus karena terlibat dalam berbagai perilaku negatif seperti tawuran, bolos sekolah, pergaulan yang tidak sehat,

serta tindakan indisipliner lainnya. Media kemudian menempatkan pendidikan di barak sebagai mekanisme untuk mengembalikan siswa pada nilai-nilai sosial yang dianggap ideal.

Hal ini terlihat dalam berita *“Disdikpora Cianjur: Pembinaan di barak dapat menekan siswa bermasalah”* yang menyebutkan:

“Dapat menekan kasus kenakalan siswa atau siswa bermasalah yang marak terjadi di Cianjur, terutama tawuran dan kenakalan lainnya” (ANTARA, 2025).

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa media membangun relasi sebab-akibat yang cukup kuat antara keberadaan siswa bermasalah dengan kebutuhan akan pembinaan berbasis militer. Dalam konteks framing Entman, masalah didefinisikan sebagai perilaku menyimpang siswa, penyebabnya diarahkan pada lemahnya kontrol sosial, sementara solusi yang ditawarkan berupa pendidikan barak di lingkungan militer.

Framing rehabilitasi moral juga tampak melalui penonjolan perubahan perilaku pasca-program. Fokus pemberitaan lebih banyak diarahkan pada hasil setelah siswa menjalani pendidikan dibandingkan pada proses pelaksanaannya. Perubahan sikap yang menjadi lebih sopan, patuh, dan tenang dikonstruksikan sebagai indikator keberhasilan moral.

Secara tidak langsung, framing ini membangun asumsi bahwa moralitas dapat dipulihkan melalui pendekatan disiplin yang ketat. Proses pendidikan dipersepsikan bukan sekadar transfer pengetahuan akademik, tetapi juga proses pengendalian perilaku sosial. Dengan demikian, pendidikan barak diposisikan sebagai sarana rehabilitasi yang bertujuan mengembalikan siswa pada perilaku yang dianggap sesuai dengan norma masyarakat.

Namun, di sisi lain, framing semacam ini juga menyederhanakan persoalan kenakalan remaja. Faktor-faktor lain seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, kesehatan psikologis, maupun tekanan ekonomi cenderung tidak memperoleh ruang pembahasan yang memadai. Akibatnya, persoalan yang kompleks direduksi menjadi masalah moral individu yang cukup diselesaikan melalui pendidikan barak militer.

C. Pendidikan Barak Militer Mempersiapkan Generasi Bangsa

Selain membentuk karakter dan merehabilitasi moral, kelompok berita pro juga menampilkan framing bahwa pendidikan di barak militer merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas. Dalam framing ini, program tidak lagi diposisikan hanya sebagai solusi terhadap siswa bermasalah, tetapi berkembang menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia secara nasional.

Pola framing tersebut terlihat ketika pemberitaan menempatkan program pendidikan di barak sebagai model yang dapat diterapkan secara lebih luas. Hal ini tampak pada pernyataan:

"Kalau Jawa Barat sukses, maka model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia" (ANTARA, 2025).

Kutipan tersebut menunjukkan adanya perluasan makna kebijakan dari tingkat lokal menuju skala nasional. Program pendidikan di barak tidak lagi dipandang hanya sebagai kebijakan penanganan masalah siswa, tetapi mulai dipersepsikan sebagai strategi pembangunan generasi muda Indonesia.

Selain itu, Pigai juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional, terutama untuk menghadapi tantangan global dan visi Indonesia Emas 2045. Ia menyatakan:

“Kalau karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global?” (ANTARA, 2025).

Framing ini menunjukkan bahwa penyebab masalah tidak hanya dilihat sebagai perilaku individu siswa, tetapi juga sebagai persoalan struktural pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.

Dalam kerangka framing Entman, media mendefinisikan persoalan bukan lagi sebatas kenakalan pelajar, tetapi juga tantangan kualitas generasi masa depan. Penyebab masalah dikaitkan dengan melemahnya karakter bangsa akibat perubahan sosial dan perkembangan zaman. Selanjutnya media memberikan penilaian moral bahwa generasi muda perlu memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, nasionalisme, dan ketahanan mental. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan pendidikan berbasis model pembinaan militer.

Framing ini memperlihatkan bagaimana pendidikan militer dikaitkan dengan nilai-nilai nasionalisme dan pembangunan bangsa. Siswa diposisikan sebagai aset negara yang perlu dipersiapkan agar memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Pendekatan barak militer kemudian direpresentasikan sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang produktif, tangguh, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial.

Melalui konstruksi tersebut, media secara tidak langsung membangun persepsi bahwa pendidikan barak militer memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa. Dengan demikian, program pendidikan di barak bukan dipahami

sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagai bagian dari agenda pembangunan karakter nasional yang lebih luas.

4.2. Framing yang Muncul pada Berita Kontra terhadap Kebijakan Pendidikan Barak Militer

Berbeda dengan kelompok berita pro, hasil analisis pada berita yang menampilkan kritik terhadap kebijakan pendidikan barak militer menunjukkan adanya konstruksi realitas yang berbeda. ANTARA membingkai isu bukan lagi sebagai persoalan kedisiplinan siswa, tetapi lebih menyoroti aspek perlindungan anak, kesesuaian pedagogi, serta kesiapan kebijakan publik.

A. Pendidikan Barak Militer Berisiko Melanggar Hak Anak

Salah satu framing dominan yang muncul dalam kelompok berita kontra adalah konstruksi bahwa pendidikan di barak militer berpotensi menimbulkan risiko terhadap pemenuhan hak anak. Dalam framing ini, media tidak lagi memosisikan siswa sebagai sumber utama masalah sosial yang harus didisiplinkan, melainkan sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin dan dilindungi selama proses pendidikan berlangsung.

Dalam perspektif framing Entman (1993), proses *problem definition* pada kelompok berita kontra menunjukkan adanya perubahan fokus persoalan. Jika pada berita pro masalah utama didefinisikan sebagai lemahnya disiplin dan meningkatnya kenakalan remaja, maka pada berita kontra masalah diarahkan pada kemungkinan munculnya dampak kebijakan terhadap kesejahteraan anak. Selanjutnya pada tahap *causal interpretation*, potensi masalah dipandang muncul dari penggunaan pendekatan militer dalam proses

pendidikan yang dinilai kurang mempertimbangkan kebutuhan perkembangan psikologis peserta didik.

Hal tersebut tampak pada berita "*Pendidikan barak militer berpotensi langgar prinsip pemenuhan hak anak*", melalui pernyataan:

"Pendidikan barak militer berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak"
(ANTARA, 2025).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa media menggeser fokus pemberitaan dari upaya memperbaiki perilaku siswa menuju perlindungan terhadap kondisi dan hak peserta didik. Framing yang dibangun menempatkan anak sebagai kelompok yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan khusus dalam setiap kebijakan pendidikan.

Dalam konteks hak anak, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses pembentukan disiplin atau pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai sarana yang harus menjamin keamanan fisik, psikologis, sosial, serta perkembangan emosional siswa. Oleh karena itu, kritik terhadap pendidikan barak militer muncul karena terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan disiplin yang terlalu ketat dapat menimbulkan tekanan psikologis atau pengalaman yang kurang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Selain itu, pemberitaan juga memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya pelabelan sosial (*labelling*) terhadap siswa yang mengikuti program tersebut. Siswa yang ditempatkan di lingkungan militer berpotensi dipersepsikan sebagai individu "bermasalah" sehingga dapat memengaruhi identitas sosial mereka dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Kondisi ini dapat berdampak terhadap rasa

percaya diri, hubungan sosial, bahkan proses perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang.

Framing ini juga memperluas makna perlindungan anak dari sekadar perlindungan fisik menuju perlindungan yang bersifat lebih menyeluruh. Hak anak tidak hanya dipahami sebagai bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan usia mereka.

Dengan demikian, kelompok berita kontra mengonstruksikan realitas bahwa kebijakan pendidikan seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak secara komprehensif. Pendekatan disiplin dipandang perlu diseimbangkan dengan aspek psikologis, emosional, dan hak dasar peserta didik agar tujuan pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Pendidikan Barak Militer Tidak Menyentuh Akar Permasalahan Sosial Anak

Framing berikutnya yang cukup dominan dalam kelompok berita kontra adalah pandangan bahwa pendidikan di barak militer tidak menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya. Dalam framing ini, media mengarahkan perhatian bahwa perilaku menyimpang siswa bukan muncul secara tiba-tiba atau semata-mata disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang lebih kompleks.

Berbeda dengan kelompok berita pro yang menghubungkan kenakalan remaja dengan krisis karakter, kelompok berita kontra justru melihat perilaku siswa sebagai hasil dari berbagai kondisi lingkungan yang memengaruhi kehidupan mereka. Faktor keluarga,

lingkungan sosial, tekanan psikologis, kondisi ekonomi, hingga pola pengasuhan diposisikan sebagai penyebab yang lebih mendasar.

Hal ini terlihat dalam berita *“PKPA sebut pembinaan anak secara militer tidak sentuh akar persoalan”* melalui pernyataan:

"Banyak dari anak-anak tersebut justru merupakan korban dari pengabaian, kekerasan, atau disfungsi keluarga" (ANTARA, 2025).

Kutipan tersebut menunjukkan perubahan perspektif yang cukup besar dalam memandang siswa. Anak tidak lagi diposisikan sebagai pelaku utama yang menyebabkan masalah, melainkan sebagai individu yang mengalami dampak dari kondisi sosial di sekitarnya. Framing ini mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa perilaku siswa sering kali merupakan manifestasi dari persoalan yang lebih luas.

Selain itu, kritik juga muncul terhadap asumsi bahwa satu metode dapat diterapkan secara seragam kepada seluruh peserta didik. Hal ini tampak dalam berita *“Wajib Militer Demul dinilai berseberangan dengan konsep pedagogi”* melalui pernyataan:

"Anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah" (ANTARA, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang efektif seharusnya mempertimbangkan kondisi individual peserta didik. Dalam prinsip pedagogi modern, pendidikan tidak hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan perkembangan individu.

Framing ini menunjukkan bahwa pendidikan barak militer dipandang lebih banyak berfokus pada gejala yang tampak di permukaan, yaitu perilaku menyimpang siswa, dibandingkan akar masalah yang melatarbelakanginya. Pendekatan disiplin mungkin mampu menghasilkan perubahan perilaku dalam jangka pendek, namun belum tentu menyelesaikan faktor penyebab yang lebih mendalam.

Dengan demikian, kelompok berita kontra mengonstruksikan realitas bahwa penyelesaian persoalan siswa membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan keluarga, konseling psikologis, dukungan lingkungan sosial, serta sistem pendidikan yang lebih inklusif. Pendidikan dipandang bukan sekadar proses pendisiplinan, tetapi juga proses memahami kebutuhan dan kondisi peserta didik secara menyeluruh.

4.3. Aktor yang Ditonjolkan dalam Pemberitaan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ANTARA cenderung menampilkan aktor-aktor institusional sebagai sumber utama dalam membangun legitimasi terhadap framing pemberitaan mengenai program pendidikan karakter di barak militer. Pilihan terhadap aktor tertentu bukan sekadar keputusan teknis jurnalistik untuk mencari narasumber, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan makna sosial atas isu yang sedang dibahas. Aktor yang dimunculkan dalam berita memiliki peran penting karena mereka membawa otoritas, nilai, dan perspektif tertentu yang kemudian memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa.

A. Aktor yang Pro Terhadap Kebijakan Militer

Pada kelompok berita yang mendukung program (framing pro), ANTARA lebih banyak menampilkan tokoh pemerintah dan pejabat negara sebagai sumber utama. Kehadiran aktor seperti Dedi Mulyadi sebagai pengagas pendidikan barak militer,

kemudian Natalius Pigai dan Wihaji sebagai menteri menunjukkan adanya upaya untuk membangun legitimasi kebijakan melalui otoritas formal negara. Dedi Mulyadi misalnya, direpresentasikan sebagai figur pemimpin yang responsif terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi generasi muda, seperti kenakalan remaja, tawuran, rendahnya disiplin, serta menurunnya nilai-nilai karakter pada anak. Dalam pemberitaan, Dedi Mulyadi tidak hanya digambarkan sebagai pejabat yang mengeluarkan kebijakan, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kepedulian dan keberanian dalam mencari solusi terhadap masalah sosial. Program pendidikan di barak militer diposisikan sebagai alternatif pembinaan yang dianggap mampu membentuk karakter siswa melalui kedisiplinan, tanggung jawab, dan pembentukan mental.

Sementara itu, kehadiran Natalius Pigai sebagai pimpinan kementerian yang mengurus HAM memperkuat dimensi legitimasi moral dan hak asasi manusia terhadap program tersebut. Sebagai pejabat yang memiliki posisi dalam isu HAM, pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan di barak tidak melanggar hak asasi manusia selama tidak disertai hukuman fisik memberikan penguatan terhadap persepsi publik bahwa program tersebut masih berada dalam batas-batas yang dapat diterima secara normatif.

Di sisi lain, Wihaji sebagai pimpinan kementerian yang mengurus kependudukan dan pembangunan keluarga juga turut memperkuat narasi bahwa pembinaan karakter membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi persoalan generasi muda yang semakin kompleks. Melalui aktor-aktor ini, ANTARA membentuk gambaran bahwa negara hadir secara aktif untuk mengatasi krisis sosial melalui pendekatan yang terstruktur dan terorganisir.

B. Aktor yang Kontra Terhadap Kebijakan Barak Militer

Sebaliknya, dalam berita yang menampilkan pandangan kontra, ANTARA lebih banyak menghadirkan aktor dari lembaga perlindungan anak, akademisi, dan pihak-pihak yang memiliki kapasitas keilmuan maupun moral dalam isu pendidikan dan hak anak. Kehadiran aktor seperti KPAI, Komnas HAM, akademisi, dan pemerhati pendidikan menunjukkan bahwa terdapat sudut pandang alternatif yang mempertanyakan efektivitas maupun implikasi program tersebut.

KPAI misalnya, direpresentasikan sebagai otoritas moral yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak. Jasra Putra menyoroti pentingnya evaluasi terkait ketepatan sasaran peserta didik, karena tidak semua anak yang mengalami masalah perilaku dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Selain itu, Ai Maryati Solihah mengangkat kekhawatiran mengenai potensi munculnya stigma terhadap anak-anak yang mengikuti program tersebut. Kekhawatiran ini menjadi penting karena pelabelan terhadap anak sebagai "bermasalah" dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan identitas sosial mereka dalam jangka panjang.

Di sisi lain, akademisi seperti Cecep Darmawan menghadirkan perspektif pedagogis yang menekankan bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada proses pembinaan yang lebih humanis dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Pernyataan bahwa "TNI bukan obat segala masalah" menunjukkan adanya kritik terhadap pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek kedisiplinan formal. Perspektif ini mengingatkan bahwa masalah remaja memiliki penyebab yang kompleks, seperti lingkungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, pola pengasuhan, hingga sistem pendidikan yang ada. Oleh karena

itu, penyelesaiannya juga memerlukan pendekatan multidimensi, bukan hanya melalui pembinaan yang bersifat militeristik.

Namun, ANTARA juga menghadirkan pejabat pemerintah yang tidak sepakat dengan kebijakan barak militer, seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Sadzily yang menyampaikan bahwa tidak sepatutnya anak-anak nakal dikirimkan ke barak militer untuk dididik, sebab dikhawatirkan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Artinya, kehadiran unsur pemerintah dalam kelompok kontra menunjukkan adanya keberimbangan.

Jika dianalisis menggunakan teori representasi Stuart Hall, pemilihan aktor dalam pemberitaan dapat dipahami sebagai bagian dari proses produksi dan pertukaran makna dalam media. Hall menjelaskan bahwa media tidak sekadar memantulkan realitas secara objektif, tetapi secara aktif membentuk dan mengonstruksi realitas melalui proses representasi. Dalam konteks penelitian ini, narasumber yang dipilih bukan hanya berfungsi sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai simbol yang membawa makna tertentu bagi masyarakat (Hall, 1997).

Pejabat pemerintah direpresentasikan sebagai simbol otoritas negara, stabilitas sosial, dan penyelesaian masalah melalui kebijakan publik. Sementara akademisi dan lembaga perlindungan anak direpresentasikan sebagai simbol rasionalitas ilmiah, nilai kemanusiaan, serta perlindungan terhadap hak individu. Dengan kata lain, ANTARA membangun arena diskursif yang mempertemukan dua cara pandang yang berbeda mengenai pendidikan karakter dan pembinaan remaja: pendekatan yang menekankan disiplin dan ketertiban sosial di satu sisi, serta pendekatan yang menekankan perlindungan hak anak dan pendidikan humanistik di sisi lain.

Selain itu, jika dikaitkan dengan paradigma kritis media, dominasi aktor institusional dalam pemberitaan juga menunjukkan adanya kecenderungan media memberikan ruang yang lebih besar kepada kelompok elite sosial dan politik dibandingkan kelompok yang menjadi objek kebijakan itu sendiri. Paradigma kritis memandang media bukan sebagai ruang yang sepenuhnya netral, melainkan arena tempat berlangsungnya relasi kekuasaan dan perebutan pengaruh antaraktor sosial.

Hal ini terlihat dari minimnya suara langsung siswa sebagai peserta program. Dalam sebagian besar berita, siswa lebih sering direpresentasikan melalui label seperti “nakal”, “bermasalah”, atau “terlibat tawuran”, tanpa adanya penjelasan lebih dalam mengenai pengalaman, perasaan, maupun pandangan mereka terhadap program yang dijalani. Akibatnya, identitas anak dalam pemberitaan menjadi cenderung disederhanakan ke dalam kategori tertentu yang dibentuk oleh perspektif pihak lain. Anak lebih banyak ditempatkan sebagai objek kebijakan yang perlu diatur, diarahkan, dan diperbaiki, dibandingkan sebagai individu yang memiliki pengalaman sosial dan hak untuk menyampaikan suaranya sendiri.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan representasi dalam pemberitaan. Ketika suara anak tidak banyak dimunculkan, maka realitas yang dibangun media menjadi lebih didominasi oleh perspektif institusi yang memiliki kekuasaan dan otoritas. Padahal, pengalaman langsung peserta program dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas maupun dampak kebijakan tersebut.

Dengan demikian, refleksi teoritis terhadap aktor dalam pemberitaan menunjukkan bahwa framing ANTARA tidak hanya dibangun melalui penyajian fakta, tetapi juga melalui pertarungan legitimasi antara berbagai aktor sosial dalam mendefinisikan makna

pendidikan dan pembinaan remaja. Negara berupaya menampilkan pendekatan pembinaan berbasis disiplin sebagai solusi terhadap persoalan sosial generasi muda, sementara akademisi dan lembaga perlindungan anak menekankan pentingnya pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada hak anak. Pertarungan makna inilah yang pada akhirnya membentuk cara publik memahami isu pendidikan karakter dalam konteks sosial yang lebih luas

4.4. Nilai Moral dalam Pemberitaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan ANTARA mengenai program pendidikan di barak militer tidak hanya berisi penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memuat konstruksi nilai dan moral tertentu yang secara tidak langsung membentuk cara masyarakat memahami program tersebut. Dalam pemberitaan, nilai moral menjadi unsur penting karena media tidak sekadar menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga membangun penilaian mengenai apa yang dianggap baik, benar, ideal, atau justru perlu dipertanyakan. Dengan kata lain, media tidak hanya memproduksi fakta, tetapi juga memproduksi makna sosial melalui nilai-nilai yang ditonjolkan dalam berita.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat dua kelompok nilai moral dominan yang muncul dalam pemberitaan ANTARA. Kelompok berita yang mendukung program pendidikan barak militer lebih banyak menonjolkan nilai disiplin, nasionalisme, tanggung jawab, pembentukan karakter, dan pembangunan bangsa. Sebaliknya, kelompok berita yang menampilkan sudut pandang kritis atau kontra lebih menekankan nilai perlindungan anak, hak asasi manusia, pendekatan pedagogis yang humanistik, serta pentingnya dukungan psikososial dalam proses pendidikan.

Pada kelompok berita pro, moralitas dibangun melalui gagasan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Kedisiplinan diposisikan bukan hanya sebagai aturan perilaku sehari-hari, tetapi sebagai modal penting bagi pembangunan bangsa di masa depan. Hal ini terlihat dari pernyataan Pigai yang menyampaikan bahwa “Kalau karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, bagaimana kita mau go global?” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa disiplin dikaitkan dengan kemampuan bangsa untuk bersaing dalam konteks global.

Melalui narasi tersebut, disiplin tidak lagi dipahami sebagai sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi diposisikan sebagai bentuk investasi sosial bagi masa depan negara. Generasi muda yang memiliki disiplin tinggi dipandang akan memiliki mental yang lebih kuat, tanggung jawab yang lebih baik, serta kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan demikian, pemberitaan membangun hubungan antara pembentukan karakter individu dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

Selain itu, pendidikan di barak militer juga direpresentasikan sebagai sarana rehabilitasi moral bagi remaja yang dianggap mengalami masalah perilaku. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai tempat pembinaan fisik atau pelatihan kedisiplinan semata, tetapi juga sebagai ruang pembentukan moral dan spiritual. Hal tersebut terlihat dalam berbagai narasi yang menekankan kegiatan seperti “belajar disiplin, menulis janji pada diri sendiri, lingkungan, dan Tuhan.” Narasi semacam ini menunjukkan bahwa program pendidikan di barak militer dipresentasikan sebagai proses transformasi diri yang menyentuh aspek perilaku, nilai kehidupan, hingga hubungan individu dengan lingkungan sosial dan keyakinannya.

Secara tidak langsung, pemberitaan tersebut membentuk pandangan bahwa persoalan kenakalan remaja dapat diselesaikan melalui proses pembinaan yang lebih terstruktur dan

disipliner. Remaja yang sebelumnya dianggap menyimpang atau bermasalah direpresentasikan sebagai individu yang dapat diperbaiki melalui penanaman nilai moral tertentu. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai alat untuk membentuk warga negara yang tertib, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan.

Di sisi lain, kelompok berita kontra membangun kerangka moral yang berbeda. Moralitas dalam pemberitaan tidak lagi berpusat pada kedisiplinan dan kontrol perilaku, tetapi lebih menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam proses pendidikan. Perspektif ini berangkat dari pandangan bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan dukungan emosional, lingkungan yang sehat, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan psikologisnya.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan PKPA yang menyebutkan bahwa “rehabilitasi pertama seharusnya dimulai dari rumah dan dukungan sistem keluarga.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa perilaku anak tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang melingkupinya. Masalah yang dialami remaja dipahami bukan sebagai kesalahan individu semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan sosial, pola pengasuhan, serta kondisi pendidikan yang diterima.

Melalui perspektif ini, penyelesaian terhadap persoalan remaja tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan yang bersifat disipliner atau koersif. Sebaliknya, dibutuhkan dukungan yang lebih menyeluruh melalui keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sistem sosial lainnya. Pendekatan psikososial dipandang lebih mampu memahami akar masalah yang dihadapi anak dibandingkan pendekatan yang menekankan pengendalian perilaku semata.

Jika dianalisis menggunakan perspektif pedagogi kritis, muncul kritik bahwa pendekatan pendidikan yang terlalu menekankan unsur militeristik berpotensi menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara negara dan peserta didik. Pedagogi kritis memandang pendidikan sebagai proses yang seharusnya mendorong dialog, kesadaran kritis, serta partisipasi aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang patuh terhadap aturan, tetapi juga individu yang mampu berpikir kritis dan memahami realitas sosial di sekitarnya.

Dalam pendekatan ini, pendidikan yang terlalu menekankan kedisiplinan formal berpotensi mengubah siswa menjadi objek pendisiplinan negara. Anak diposisikan sebagai pihak yang harus diarahkan, dikontrol, dan dibentuk sesuai standar tertentu tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pengalaman serta kebutuhan individual mereka. Akibatnya, pendidikan berisiko berubah menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap tubuh, perilaku, dan identitas peserta didik.

Oleh karena itu, kritik terhadap pendidikan barak militer tidak hanya berkaitan dengan metode pembelajaran yang digunakan, tetapi juga menyangkut ideologi yang mendasari pendekatan pendidikan tersebut. Pertanyaan yang muncul bukan hanya “apakah metode ini efektif?”, tetapi juga “nilai seperti apa yang sedang dibangun?” serta “siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan bentuk pendidikan yang ideal?”

Refleksi teoritis ini menunjukkan bahwa pemberitaan ANTARA menjadi arena pertarungan moral antara dua paradigma pendidikan yang berbeda. Paradigma pertama menekankan pentingnya disiplin, nasionalisme, dan keteraturan sosial sebagai fondasi pembangunan bangsa. Dalam paradigma ini, negara memiliki peran sentral dalam membentuk karakter generasi muda melalui berbagai kebijakan pendidikan. Sementara paradigma kedua lebih menekankan

pentingnya perlindungan anak, pendekatan psikososial, serta pendidikan yang humanistik dan berbasis hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ANTARA cenderung membangun framing yang relatif moderat terhadap kebijakan pendidikan di barak militer. Media tidak secara mutlak mendukung maupun menolak kebijakan tersebut, melainkan menghadirkan ruang diskursif yang mempertemukan berbagai pandangan yang saling berhadapan. ANTARA berusaha menghadirkan dinamika perdebatan antara perspektif negara yang menekankan kedisiplinan dan perspektif perlindungan anak yang menekankan aspek kemanusiaan.

Jika dikaitkan dengan perspektif framing Robert Entman, ANTARA melakukan proses seleksi realitas dengan menonjolkan aspek tertentu seperti disiplin, nasionalisme, perlindungan anak, pedagogi, dan regulasi kebijakan. Pemilihan aspek-aspek tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi publik mengenai bagaimana masalah kenakalan remaja dipahami dan bagaimana solusi yang dianggap tepat untuk mengatasinya.

Sementara itu, melalui teori representasi Stuart Hall, pemberitaan memperlihatkan bagaimana media memproduksi makna mengenai konsep seperti “anak bermasalah,” “pendidikan karakter,” dan “negara.” Makna tersebut dibentuk melalui pemilihan narasumber, penggunaan istilah tertentu, serta penonjolan nilai-nilai moral tertentu dalam berita (Hall, 1997).

Dengan demikian, pemberitaan mengenai pendidikan barak militer tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi tentang kebijakan publik, tetapi juga menjadi ruang ideologis yang memperlihatkan bagaimana media mengonstruksi hubungan antara negara, pendidikan, disiplin, moralitas, dan hak anak dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Pemberitaan pada akhirnya bukan hanya menjelaskan realitas, tetapi juga berperan dalam

membentuk cara masyarakat memahami nilai-nilai yang dianggap penting dalam proses pendidikan dan pembentukan generasi muda.

4.5. Refleksi Teoritis

Hasil analisis framing terhadap pemberitaan kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik, tetapi juga aktif membentuk realitas sosial melalui konstruksi makna tertentu. Dalam konteks ini, pemberitaan ANTARA memperlihatkan bagaimana isu pendidikan karakter, kedisiplinan, perlindungan anak, hingga legitimasi pendekatan semi-militer diproduksi dan dinegosiasikan dalam ruang publik. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemberitaan media mengenai kebijakan pendidikan tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu membawa sudut pandang, penekanan isu, serta ideologi tertentu yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial.

Sebelum merefleksikan temuan menggunakan teori konstruksi sosial, penting untuk mengartikulasikan terlebih dahulu makna utama dari temuan framing pada Bab III. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pemberitaan ANTARA cenderung membangun dua konstruksi utama. Pertama, konstruksi yang memosisikan kebijakan barak militer sebagai solusi alternatif terhadap krisis moral, kedisiplinan, dan kenakalan remaja. Kedua, konstruksi yang melihat kebijakan tersebut sebagai kebijakan problematis yang berpotensi menimbulkan persoalan psikologis, pedagogis, dan pelanggaran hak anak. Dua konstruksi ini menunjukkan bahwa media menghadirkan arena diskursif tempat berbagai aktor sosial saling berkompetisi untuk mendefinisikan realitas mengenai pendidikan karakter dan otoritas negara dalam mendisiplinkan warga.

Makna yang lebih dalam dari temuan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kebijakan barak militer sesungguhnya bukan hanya membahas metode pendidikan, tetapi juga menyangkut pertarungan ideologis mengenai model relasi negara dan masyarakat. Narasi pendukung kebijakan cenderung menempatkan negara sebagai aktor otoritatif yang memiliki legitimasi untuk menggunakan pendekatan disipliner demi membentuk karakter generasi muda. Sebaliknya, narasi penolakan menekankan pentingnya pendidikan humanistik, perlindungan hak anak, serta pembatasan intervensi militer dalam ranah sipil. Dengan demikian, isu pendidikan karakter berubah menjadi arena kontestasi makna tentang disiplin, kekuasaan, moralitas, dan otoritas negara.

Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial tidak hadir secara alamiah dan objektif, tetapi dibentuk melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pemberitaan media memainkan peran penting dalam ketiga proses tersebut. Pada tahap eksternalisasi, kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer merupakan bentuk ekspresi subjektif pemerintah daerah dalam mendefinisikan masalah sosial remaja sekaligus menawarkan solusi tertentu. Pemerintah daerah mengeksternalisasikan pandangan bahwa menurunnya disiplin pelajar, meningkatnya kenakalan remaja, dan lemahnya karakter generasi muda membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan disipliner (Berger & Luckmann, 1990).

Pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang muncul dalam pemberitaan memperlihatkan bagaimana negara berusaha membangun legitimasi moral terhadap kebijakan tersebut. Narasi seperti “pembinaan karakter,” “pendisiplinan pelajar,” dan “penguatan mental kebangsaan” menjadi simbol-simbol yang digunakan untuk membingkai kebijakan agar tampak

rasional dan diperlukan. Dalam konteks konstruksi sosial, simbol-simbol tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan definisi realitas yang ingin diterima publik. Artinya, pemerintah tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga memproduksi makna mengenai apa yang dianggap sebagai solusi sah terhadap problem sosial remaja.

Namun, proses konstruksi realitas tersebut tidak berjalan secara tunggal. Temuan penelitian menunjukkan adanya kontra-framing dari berbagai aktor seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, akademisi, psikolog, dan sejumlah pejabat pemerintah lain yang mempertanyakan efektivitas maupun legitimasi pendekatan semi-militer dalam pendidikan. Kritik terhadap belum adanya standar operasional prosedur, potensi kekerasan simbolik, ancaman terhadap psikologi anak, serta kemungkinan pelanggaran hak anak memperlihatkan bahwa realitas sosial selalu bersifat intersubjektif dan terbuka terhadap perdebatan. Dalam teori Berger dan Luckmann, kondisi ini menunjukkan bahwa realitas sosial terbentuk melalui negosiasi makna antaraktor yang memiliki kepentingan, pengalaman, dan ideologi berbeda (Berger & Luckmann, 1990).

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa media menjadi arena kontestasi simbolik. ANTARA tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memilih sumber, menentukan sudut pandang, serta memberi penekanan tertentu terhadap aspek kebijakan. Ketika pemberitaan lebih banyak menonjolkan keberhasilan program, testimoni perubahan perilaku siswa, dan dukungan pejabat negara, maka media sedang membangun objektivasi bahwa pendekatan militeristik merupakan solusi efektif bagi pendidikan karakter. Sebaliknya, ketika media menyoroti kritik mengenai hak anak, psikologi pendidikan, dan ketidakjelasan regulasi, maka media sedang membentuk realitas bahwa kebijakan tersebut problematis dan memerlukan evaluasi kritis

4.6. Refleksi Praktis

Implikasi praktis dari pemberitaan mengenai kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat menunjukkan bahwa media memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pendidikan alternatif. Framing media yang menampilkan sisi dukungan maupun kritik terhadap kebijakan tersebut berdampak pada penerimaan masyarakat terhadap program pembinaan siswa bermasalah. Dalam praktiknya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan strategi komunikasi kebijakan secara transparan, partisipatif, dan berbasis data agar kebijakan tidak hanya dipahami sebagai langkah populis, tetapi sebagai solusi pedagogis yang memiliki landasan akademik dan regulasi yang jelas.

Implikasi praktis berikutnya berkaitan dengan tata kelola kebijakan pendidikan. Temuan pemberitaan yang menyoroti belum adanya standar operasional prosedur, kejelasan regulasi, serta ketepatan sasaran peserta menunjukkan pentingnya perencanaan kebijakan yang matang sebelum implementasi. Secara praktis, pemerintah daerah maupun pusat perlu memastikan adanya pedoman teknis, mekanisme evaluasi, serta koordinasi lintas sektor (pendidikan, perlindungan anak, psikologi, dan keamanan) agar program pembinaan karakter tidak menimbulkan risiko pelanggaran hak anak maupun konflik kebijakan dengan sistem pendidikan nasional.

Selain itu, implikasi praktis juga terlihat pada kebutuhan pendekatan pendidikan karakter yang lebih komprehensif. Pemberitaan yang menampilkan perspektif bahwa kenakalan remaja memiliki akar sosial, keluarga, dan lingkungan menunjukkan bahwa solusi tidak dapat semata-mata bersifat disipliner atau militeristik. Dalam praktik pendidikan, hal ini menuntut penguatan peran sekolah, keluarga, konselor pendidikan, serta program pembinaan berbasis komunitas agar

penanganan perilaku remaja bermasalah bersifat preventif, edukatif, dan rehabilitatif, bukan sekadar represif.

Implikasi lain berkaitan dengan hubungan sipil-militer dalam konteks pendidikan. Munculnya wacana pelibatan institusi militer dalam pembinaan siswa menunjukkan perlunya batasan yang jelas agar tidak terjadi normalisasi pendekatan militeristik dalam ruang pendidikan sipil. Secara praktis, jika pelibatan tersebut dilakukan, perlu adanya pengawasan ketat, prinsip perlindungan anak, serta integrasi metode pendidikan humanistik agar tujuan pembentukan karakter tetap sejalan dengan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pedagogi modern.

Selanjutnya, implikasi praktis juga menyentuh aspek legitimasi kebijakan publik. Pro dan kontra yang muncul dalam pemberitaan menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal pemerintah, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, praktik kebijakan publik memerlukan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan seperti akademisi, orang tua, organisasi perlindungan anak, serta masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif ini penting agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi sosial sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi program.

Terakhir, implikasi praktis dari analisis pemberitaan ini adalah perlunya literasi media bagi masyarakat dan pemangku kebijakan. Media framing dapat mempengaruhi cara publik memahami suatu kebijakan, sehingga kemampuan masyarakat untuk membaca berita secara kritis menjadi penting agar tidak terjebak pada narasi tunggal. Bagi pembuat kebijakan, pemahaman terhadap dinamika framing media juga dapat membantu dalam merancang komunikasi publik yang lebih efektif, akuntabel, dan sensitif terhadap potensi kontroversi kebijakan.

1.7. Refleksi Sosial

Implikasi sosial dari kebijakan pendidikan karakter berbasis barak militer yang diberitakan secara luas menunjukkan adanya pembentukan opini publik yang terbelah antara dukungan dan penolakan. Pemberitaan yang menampilkan sisi positif, seperti peningkatan disiplin dan perubahan perilaku siswa, berpotensi membangun persepsi bahwa pendekatan militeristik dapat menjadi solusi cepat terhadap kenakalan remaja. Sebaliknya, pemberitaan yang menyoroti risiko pelanggaran hak anak, ketidaksiapan regulasi, serta akar masalah sosial yang belum tersentuh turut membentuk sikap kritis masyarakat. Polarisasi opini ini menjadi implikasi sosial penting karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, pemerintah daerah, maupun lembaga perlindungan anak.

Implikasi sosial lainnya berkaitan dengan konstruksi stigma terhadap anak atau remaja yang dikategorikan “bermasalah”. Pemberitaan mengenai pengiriman siswa ke barak militer berpotensi menciptakan label sosial tertentu terhadap anak-anak yang terlibat kenakalan, seperti dianggap sulit dibina atau membutuhkan pendekatan keras. Kondisi ini dapat berdampak pada relasi sosial mereka di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat setelah mengikuti program tersebut. Jika tidak diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif dan reintegrasi sosial, stigma tersebut dapat menghambat proses pemulihan identitas sosial anak dan bahkan memperkuat marginalisasi sosial.

Selain itu, kebijakan ini juga memiliki implikasi terhadap relasi keluarga dan pola pengasuhan. Diskursus media yang menekankan bahwa kenakalan remaja berkaitan dengan faktor keluarga, pengawasan orang tua, dan lingkungan sosial dapat mendorong refleksi kolektif mengenai pentingnya peran keluarga dalam pendidikan karakter. Namun di sisi lain, terdapat potensi pergeseran tanggung jawab dari keluarga dan sekolah kepada institusi eksternal seperti

militer. Jika hal ini terjadi secara berlebihan, masyarakat dapat menganggap pendekatan disipliner eksternal sebagai solusi utama, bukan penguatan fungsi keluarga dan pendidikan formal.

Implikasi sosial berikutnya berkaitan dengan normalisasi pendekatan militeristik dalam ruang sipil, khususnya pendidikan. Pemberitaan yang secara berulang menampilkan keterlibatan institusi militer dalam pembinaan siswa dapat membentuk persepsi bahwa militer memiliki peran yang wajar dalam menyelesaikan persoalan sosial pendidikan. Dalam konteks sosial demokratis, kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak menggeser prinsip pendidikan humanistik dan partisipatif. Oleh karena itu, diskursus publik perlu terus mendorong keseimbangan antara kedisiplinan, perlindungan hak anak, serta pendekatan pedagogis yang inklusif.

Terakhir, implikasi sosial juga terlihat pada meningkatnya perhatian publik terhadap isu pendidikan karakter dan kenakalan remaja. Kontroversi kebijakan ini memicu diskusi luas di masyarakat mengenai metode pendidikan, peran negara dalam pembinaan generasi muda, serta batas intervensi institusi non-pendidikan dalam ranah pendidikan. Dampak positifnya, isu pendidikan karakter menjadi perhatian kolektif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pendidikan. Namun, jika tidak dikelola dengan komunikasi yang konstruktif, perdebatan publik yang tajam juga berpotensi menimbulkan konflik persepsi serta ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah.